

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Model Penerapan E-Governance Guna Mencegah Korupsi Di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Drs. CHRISNA SUHENDI MBA., S.E., Akt.
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung
NIDN : 0603046301
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP : 081325671964
Alamat surel (e-mail) : suhendichrisna@yahoo.co.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : Drs ZAENUDIN MM
NIDN : 0604036303
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung
Institusi Mitra (jika ada) : -
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 53.500.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 150.000.000,00


Mengetahui,
Dekan Fak. Ekonomi

(Olivia Fachrunnisa, Ph.D)
NIP/NIK 210499044

Semarang, 18 - 11 - 2015
Ketua,



(Drs. CHRISNA SUHENDI MBA., S.E., Akt.)
NIP/NIK 210493034

Menyetujui,
Ketua LPP Unissula

(DR. Ir. Suryani Alifah, MT)
NIP/NIK 210601024

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas dan efisiensi penerapan good governance berbasis teknologi informasi (E-Governance) dan orang-orang dibalik penggunaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan agar tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan dapat dihindari. Untuk mencapai tujuan itu maka perlu diidentifikasi kondisi existing dan kendala-kendala yang timbul baik dari faktor intrnal maupun eksternal yang dapat menghambat penerapan sistem ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan unit analisis adalah Kepala SKPD. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan proporsional random sampling. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi hipotesis digunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif yaitu dengan alat analisis Metode Path Anlysis (SEM) untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Output peneltian adalah Usulan Model Pencegahan Korupsi yang cocok bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya dapat disusun suatu kebijakan pemerintah yang dapat dituangkan ke dalam suatu Perda yang mengatur mengenai sistem tata kelola baku bagi SKPD di pemerintahan daerah. Diharapkan kebijakan ini dapat menciptakan suatu sitem tata kelola yang akan menjadi rujukan bagi pemerintahan di wilayah lainnya.